

GEREJA METHODIST DAN PERSOALAN SOSIAL ORANG-ORANG TIONGHOA DI KOTA SURABAYA PADA ZAMAN HINDIA BELANDA, 1909-1928

Markus Dominggus Lere Dawa¹

ABSTRAKSI

Pada tahun 1909, Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia untuk pertama kalinya membuka sebuah jemaat di Pecinan Surabaya. Sejak itu dan terus selama dua puluh tahun kemudian, Gereja Methodist hadir untuk menjangkau dan melayani orang-orang Tionghoa yang berdomisili di wilayah itu. Sebagai pendatang yang mencari nafkah di negeri asing, orang-orang Tionghoa yang menjadi target Gereja Methodist ini menghadapi sejumlah persoalan: lingkungan pemukiman yang buruk, lingkungan sosial yang sakit, hidup tanpa pasangan dan pendidikan. Lewat teori-teori tentang keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial yang dihadapi oleh masyarakatnya, dan khususnya pikiran Calvin Van Reken tentang peran gereja sebagai institusi dan gereja sebagai organisme, artikel ini mencoba secara kritis meneropong peran yang dimainkan Gereja Methodist dalam mengatasi masalah yang dihadapi orang-orang Tionghoa di Pecinan Surabaya. Dari kedua karakter itu, Gereja Methodist Episkopal di Surabaya telah coba menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di Pecinan. Namun pendekatan yang dipakai masih pada menciptakan ruang alternatif di dalam kompleks gereja dan belum sampai menyentuh pada fundamen persoalan, yaitu kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk orang-orang Tionghoa kala itu.

Kata kunci: Gereja Methodist, orang Tionghoa, Pecinan Surabaya, masalah-masalah sosial, gereja sebagai institusi, gereja sebagai organisme.

¹ Pendeta Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) dan dosen paruh waktu di STT Aletheia. Gelar Sarjana Teologi dari STTA tahun 1997; Master of Arts in Religion Studies dari Temple University, PA, tahun 2008; dan sedang menyelesaikan disertasi doktor sosiologi agama di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, untuk penelitian atas orang-orang Tionghoa Kristen di Gereja Kristus Tuhan pada zaman pemerintahan Orde Baru.

PENDAHULUAN

Pada umumnya orang Kristen sepakat bahwa gereja harus melibatkan diri dalam penyelesaian masalah-masalah sosial di masyarakatnya. Namun kesepakatan itu akan mulai berhenti ketika pembicaraan mulai tiba pada apa makna keterlibatan itu; sejauh mana gereja harus terlibat dan bagaimana dalam situasi sosial tertentu keterlibatan itu akan diwujudkan. Tulisan ini tidak bermaksud masuk ke dalam perdebatan-perdebatan itu melainkan coba mencermati apa yang dilakukan oleh sebuah gereja di kota Surabaya pada masa kolonial terhadap orang-orang dari kelompok yang menjadi sasaran mereka mengabarkan Injil. Gereja dimaksud adalah Gereja Methodist Episkopal di Surabaya; sementara orang-orang dimaksud adalah orang-orang Tionghoa *totok* di kota Surabaya.²

Dengan bantuan teori tentang keterlibatan gereja dalam masyarakat, pertanyaan yang mau dijawab oleh tulisan ini adalah bagaimana cara Gereja Methodist mengambil bagian menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa *totok* di kota Surabaya. Informasi primer untuk penelitian ini diperoleh dari notulen-notulen Konferensi Tahunan Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia dan Gereja Methodist Episkopal Konferensi Misi Hindia Belanda serta catatan-catatan lain yang ditulis oleh utusan-utusan Badan Misi Luar Negeri Gereja Methodist Episkopal Amerika Serikat di Hindia Belanda serta tulisan-tulisan sejarah dari sebuah gereja Tionghoa yang ada di kota Surabaya.³ Sumber-sumber sekunder diperoleh dari buku-buku sejarah misi Methodist dan sumber-sumber lain mengenai orang Tionghoa secara umum di Indonesia.

² Istilah *Tionghoa totok* di sini mengacu kepada orang-orang Tionghoa perantauan dari Tiongkok, yang masuk ke kota Surabaya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Istilah *totok* menunjuk kepada karakteristik budayanya yang amat kental sekali.

³ Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan digital *Yale University* (<http://divdl.library.yale.edu/dl/Browse.aspx?qc=AdHoc&qqs=1158>) dan kantor arsip Gereja Methodist Singapura, di Singapura. Penulis sempat berkunjung ke kantor arsip ini pada bulan April 2013.

KERANGKA TEORI

Dalam salah satu kritiknya atas pikiran Hegel, Marx mengatakan bahwa agama adalah *“the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.... The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness.”*⁴ Dengan pernyataan ini Marx mau mengatakan bahwa dalam dirinya agama tidak mampu memberi kontribusi apa-apa kepada pembebasan manusia dari kondisi-kondisi sosial yang menindasnya. Agama bukannya menolong manusia melepaskan dirinya tetapi malah “menipunya” dengan memberi dia suatu kebahagiaan semu di tengah-tengah tekanan penderitaannya. Kebahagiaan semu itu membuat dia lupa kepada penyebab persoalan hidupnya yang sebenarnya. Karena itu, agama harus dibuang kalau orang mau memperoleh *“their real happiness”* – kebahagiaan mereka yang sejati.

Kalau Marx melihat agama tidak dapat diharapkan untuk melakukan sebuah transformasi sosial dan karena itu keikutsertaannya di dalam sebuah proses transformasi sosial sebaiknya ditolak maka kelompok fundamentalis Kristen, yang muncul di AS pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap paham modernisme dan liberalisme dalam teologi, juga menolak keterlibatan agama dalam problema sosial kemasyarakatan namun dengan alasan yang berbeda. Keikutsertaan agama sebaiknya dihindari karena justru berbahaya bagi agama itu sendiri. Bahaya dimaksud adalah akan *“watering down the complete message of the Bible, and to the further secularization of the Church.”*⁵

Pikiran fundamentalis ini merupakan respons terhadap “Injil sosial” yang diberitakan oleh kelompok Protestan-Liberal yang muncul pada kurun waktu yang sama. Dalam pandangan Walter Rauschenbusch, figur yang dianggap sebagai tokoh Injil sosial ini, agama malah relevan dan bermanfaat untuk sebuah transformasi sosial. Dari studinya atas nabi-nabi Perjanjian Lama, pengajaran Yesus dan kehidupan serta aksi Gereja mula-mula,

⁴ John C. Raines, ed., *Marx On Religion* (Philadelphia: Temple University Press, 2002), hal. 171.

⁵ Paul Benware, “The Social Responsibility of the Church” dalam *Grace Journal* 12:1 (Winter 1971), 3.

Rauschenbusch tiba pada sebuah kesimpulan bahwa tujuan hakiki agama Kristen adalah *“to transform human society into the Kingdom of God by regenerating all human relations and reconstituting them accordance with the will of God.”*⁶ Bahwa agama Kristen belum melakukan hal itu dikarenakan sejumlah faktor historis yang bermain dalam sejarah gereja.⁷ Namun semuanya itu tak bisa menghapus fakta bahwa sesungguhnya agama Kristen ada untuk mengubah *“the world-as-it-is into the world-as-it-ought-to-be.”*⁸ Dengan dasar ini maka gereja atau orang-orang Kristen harus melibatkan diri secara aktif dalam usaha-usaha menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakatnya.⁹

Masalah yang kemudian timbul adalah dengan cara bagaimana keterlibatan itu akan diwujudkan. Bagi Rauschenbusch keterlibatan itu akan diwujudkan oleh dua medium yang saling berhubungan. Yang pertama melalui orang-orang Kristen yang memeluk “agama sosial,” bukan “agama personal.” Seperti pemeluk agama personal, pemeluk agama sosial mengalami kelahiran baru, yang membawa mereka tunduk di bawah dominasi Kristus, yang memungkinkan mereka menilai hidup ini seperti Kristus menghakiminya.¹⁰ Dalam praktik hidup kesehariannya, orang-orang ini tidak akan tinggal diam dalam gerejanya dan sibuk dengan urusan-urusan gerejanya saja. Mereka akan secara aktif menginkarnasikan *“the principles of a higher social order in his attitude to all questions and in all his relations to men, and will be a well-spring of regenerating influences.”*¹¹

⁶ Walter Rauschenbusch, *Christianity and Social Crisis in the 21st Century: The Classic that Woke up the Church*, Paul Raushenbush, ed. Harper-Collins e-books, xvii.

⁷ Rauschenbusch membahas faktor-faktor ini secara khusus dalam Bab IV.

⁸ *Ibid.*, 123.

⁹ Dalam komentarnya atas pikiran Rauschenbusch, Stanley Hauerwas mengakui dengan jujur bahwa kontribusi signifikan Rauschenbusch adalah penegasannya bahwa memberitakan kabar baik tentang Kerajaan Allah menuntut orang Kristen supaya tidak lupa bahwa ia dipanggil keluar dari dunia ini untuk ditaruh kembali di dalam pelayanan bagi dunia ini. Lihat Stanley Hauerwas, “Repent! The Kingdom is Here” dalam *Christianity and Social Crisis in the 21st Century*, 175.

¹⁰ Rausechenbusch, *Christianity and Social Crisis in the 21st Century*, hal. 285, 286.

¹¹ *Ibid.*, 287.

Sarana kedua adalah melalui komunitas keagamaan di mana orang-orang yang sudah dilahirkan kembali itu berada. Komunitas ini penting karena kelahiran kembali, menurut Rauschenbusch, hanya menciptakan keinginan untuk melakukan yang benar. Ia tidak mendefinisikan apa yang benar bagi manusia. Yang bertugas mendefinisikan itu adalah komunitas keagamaan dalam mana orang yang dilahirkan kembali ini berada.¹² Kalau komunitas tersebut memahami yang religius itu sebagai apa yang dilakukan terhadap jiwa-jiwa manusia dan apa yang melayani gereja saja maka definisi mengenai apa yang benar bagi orang yang sudah dilahirkan kembali hanya akan sampai di situ saja. Tetapi, kalau komunitas ini menaruh Kerajaan Allah sebagai tujuan yang mencakup semuanya, termasuk relasi-relasi yang benar di antara manusia maka komunitas semacam ini akan mendorong orang untuk ambil bagian dalam usaha-usaha mengeliminasi hal-hal yang membahayakan hidup manusia dan memaksimalkan hal-hal yang melindungi hidup umat manusia.¹³

Dua sarana ini, personal yang telah dilahirkan kembali dan komunitas keagamaan, terus menjadi semacam kerangka kerja yang membingkai percakapan orang Kristen mengenai keterlibatan gereja dalam menangani masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Pada sebagian orang Kristen, keterlibatan gereja adalah melalui individu-individu anggota suatu gereja; sementara sisanya meyakini bahwa keterlibatan itu harus melalui kelompok. Dalam kerangka ini Calvin Van Reken maju dengan gagasan gereja sebagai *institusi/lembaga* dan gereja sebagai *organisme*.¹⁴

Sebagai institusi, gereja adalah organisasi formal yang bermaksud mencapai suatu tujuan spesifik. Gereja adalah agen, yang dapat melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu dan memiliki pilihannya sendiri. Sebagai institusi ia memiliki tujuan-tujuan dan rencana-rencana sendiri, struktur-strukturnya dan misinya sendiri. Ia memiliki ruang gerak sendiri, dan dalam banyak hal ia mirip seperti lembaga-lembaga sosial lain di dunia ini.¹⁵ Sebagai organisme gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Gereja

¹² Rausechenbusch, *Christianity*, 289-290.

¹³ *Ibid.*, 289.

¹⁴ Calvin Van Reken, "The Church's Role in Social Justice" dalam *Calvin Theological Journal* 34 (1999): 198-202.

¹⁵ *Ibid.*

bukan organisasi melainkan kumpulan dari individu-individu orang percaya. Setiap orang Kristen adalah seorang agen personal, yang memiliki suatu tujuan, suatu vokasi dan suatu panggilan di dalam rencana Allah—apakah itu sebagai seorang tukang ledeng, guru, politisi dan lain-lain.¹⁶

Sebagai individu tiap-tiap orang Kristen bertanggung jawab menunaikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Memberi makan orang lapar, menghibur yang sedih, mengunjungi mereka yang sakit dan terpenjara dan lain-lainnya adalah bagian dari melaksanakan pekerjaan kerajaan. Pekerjaan gereja secara institusional berbeda dari itu. Pekerjaan gereja institusional bukan untuk mempromosikan keadilan sosial melainkan untuk memperingatkan orang tentang keadilan (*justice*) ilahi. Bisnis utamanya bukan memanggil masyarakat untuk lebih adil-benar (*righteous*) melainkan untuk memberitahu tentang kebenaran-keadilan (*righteousness*) Allah dalam Kristus Yesus. Tugas utamanya bukan memberitahu orang mengenai siapa yang harus dipilih untuk sebuah jabatan publik melainkan memberitahu orang dari segala bangsa tentang Dia yang memilih orang-orang untuk hidup yang kekal. Tugas utama gereja institusional adalah membuka dan menutup Kerajaan Allah serta merawat iman Kristen. Hal itu dilakukannya dengan memberitakan Injil yang murni, pelayanan sakramen dan disiplin gerejawi.¹⁷

Tentu saja gereja institusional tidak dilarang untuk mengungkapkan suaranya secara aktif untuk mempromosikan keadilan sosial. Tetapi Van Reken mengingatkan bahwa keterlibatan itu harus dilakukan secara cermat terhadap kebijakan-kebijakan sosial-politis yang jelas-jelas tidak bermoral, tujuan dan caranya atau salah satunya. Ia memberi contoh mengenai kebijakan legalisasi aborsi sebagai alat untuk mereduksi kemiskinan di AS. Meski tujuannya mulia namun karena caranya tidak tepat maka Gereja sebagai institusi harus menyuarakan perlawanannya terhadap kebijakan tersebut.

Teori Van Reken tentang gereja institusional dan gereja organis ini akan dipakai di sini dalam memahami gerak Gereja

¹⁶ Van Reken, "The Church's Role", 198-202.

¹⁷ *Ibid.*, 199.

Methodist Episkopal Konferensi Malaysia dan Gereja Methodist Konferensi Misi Hindia Belanda. Akan dideskripsikan cara-cara yang dipergunakan oleh gereja ini sebagai institusi dan sebagai suatu organisme dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial orang-orang Tionghoa yang di Pecinan Surabaya yang menjadi *target group* pekabaran Injil-nya. Sebelum sampai ke situ terlebih dahulu akan diuraikan secara ringkas sejarah kehadiran Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia dan Gereja Methodist Episkopal Konferensi Misi Hindia Belanda di Kota Surabaya. Dari situ lalu dilanjutkan dengan uraian singkat mengenai sejumlah problem sosial yang dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di kota Surabaya. Bagian berikutnya akan menyajikan temuan-temuan tentang keterlibatan Gereja Methodist di dalam menangani masalah-masalah sosial orang Tionghoa tersebut. Dan di akhir tulisan ini, akan diberikan sejumlah catatan kritis mengenai keterlibatan itu ditinjau dari dua kerangka yang ditawarkan Van Reken.

Gereja Methodis Episkopal di Kota Surabaya

Kehadiran Gereja Methodist Episkopal di kota Surabaya bermula dari visi William F. Oldham, *Superintendent of Malaysia Mission* dari Gereja Methodist Episkopal. Visi yang sudah timbul sejak akhir abad ke-19 itu ditindaklanjuti dengan kunjungan singkat ke Batavia untuk melihat kemungkinan-kemungkinan melakukan pekerjaan misi di Jawa. Namun visi ini baru bisa diwujudkan hampir satu setengah dekade kemudian dengan mengutus John R. Denyes ke Batavia pada bulan Februari 1905.¹⁸

Setelah empat tahun bekerja di Batavia, Denyes kemudian melebarkan pekerjaan misi Methodist sampai ke sisi timur pulau Jawa. Pada waktu mengunjungi kota itu ia mendapati bahwa hampir-hampir tidak ada satu hal yang berarti dari yang sudah dilakukan selama ini untuk menginjili kota perdagangan yang

¹⁸ J. Tremayne Copplestone, *History of Methodist Mission Vol. IV: Twentieth-Century Perspectives* [The Methodist Episcopal Church, 1896-1939] (New York: The Board of Global Ministries The United Methodist Church, 1973), 144.

berpenduduk 150.000 jiwa ini.¹⁹ Itu sebabnya maka pada tahun 1909 ia mensupervisi pembukaan sebuah pos pekabaran Injil Methodist di Surabaya. Untuk mengerjakan pekerjaan ini Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia mengutus seorang pengkhotbah berbahasa Hokkien, yang bernama Diong Eng Seng dan isterinya. Ibadah pertama terjadi pada hari Minggu pertama di bulan Juni 1909. Tempat ibadahnya adalah sebuah ruko sempit di Pecinan, Surabaya, dengan kapasitas maksimal dua puluh lima orang saja.

Setelah tiga tahun berjalan, pada musim panas tahun 1912, Gereja Methodist mengutus Harry Clayton Bower dan Mabel Crawford Bower, isterinya, diutus untuk memimpin pekerjaan misi di sana.²⁰ Pada saat itu jumlah pengunjung ibadah tiap hari Minggu hanya 15 orang saja. Akibat dukungan finansial yang terbatas dari badan misi luar negeri Methodist AS maka selama lima tahun pertama kehadiran mereka di sana Bower dan Mabel harus bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sebuah sekolah Tionghoa milik organisasi *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK)²¹ dan memberikan les privat bahasa Inggris. Uang yang diterima dari dua pekerjaan ini dipergunakan untuk membiayai hidup mereka sehari-hari, membayar biaya sewa gedung ibadah dan membayar tunjangan hidup pengkhotbah bahasa Tionghoa dan keluarganya yang melayani bersama mereka.

Dengan beban mengajar yang begitu berat maka dalam dua tahun pertama kehadirannya di sana, mereka berdua tidak bisa berbuat banyak untuk mengerjakan "*the real business*" seorang misionaris, yaitu "*evangelistic work.*" Yang baru bisa dilakukan

¹⁹ J. Tremayne Copplestone, *History of Methodist Mission Vol. IV: Twentieth-Century Perspectives* [The Methodist Episcopal Church, 1896-1939] (New York: The Board of Global Ministries The United Methodist Church, 1973), 150.

²⁰ Surat Rev. Harry C. Bower kepada Dr. Ralph E. Diffendorfer, *Corresponding Secretary* dari Badan Misi Luar Negeri Gereja Methodist Episkopal, tanggal 11 Juli 1925. Paragraf selanjutnya akan bersumber dari surat Bower ini. Jika ada sumber informasi lain akan diberikan catatan kaki tersendiri.

²¹ Kerja sama dengan THHK dimulai pada tahun 1910 oleh Denyes yang mewakili Misi Methodist dengan pengurus THHK di Batavia untuk mengajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah THHK. Dalam kesepakatan kerja itu, THHK akan memberi gaji sesuai dengan standar hidup misionaris sementara Misi Methodist akan mensuplai kebutuhan guru tersebut. Guru-guru itu terikat kontrak mengajar selama 3-5 tahun. Lihat Copplestone, hal. 151. Juga lihat Ralph E. Diffendorfer, *Foreign Mission Report dari Report of Corresponding Secretary tahun 1927*, 53.

adalah berkenalan dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang akan mereka injili serta mempelajari bahasa Tionghoa. Setelah dua tahun berlalu, lewat kegiatan penjualan Alkitab dalam bahasa Tionghoa, mereka berhasil menjaring sejumlah besar anggota baru. Ruangan yang dipakai selama ini jadi tidak memadai lagi untuk menampung pengunjung ibadah. Tepat di saat itu diketahui bahwa di tengah-tengah Pecinan ada sebuah gedung bekas hotel yang mau dijual. Meski kondisinya sangat buruk karena dimakan usia namun lokasinya yang strategis di jantung Pecinan membuat gedung itu tetap dibeli juga. Harga pembelian yang disepakati adalah 10.000 USD. Dari jumlah itu anggota jemaat berhasil mengumpulkan yang sejumlah 1.500 USD. Sisanya diperoleh dari pinjaman bank dan badan misi Methodist.

Pada tahun 1918, Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia melakukan penataan area pelayanan. Kawasan Hindia Belanda yang selama ini merupakan salah satu distrik pelayanan Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia sekarang didewasakan dan menjadi sebuah area terpisah dengan nama *Netherland Indies Mission Conference* (NIMC) atau Konferensi Misi Hindia Belanda (KMHB). Bersama dengan area Singapura dan Malaysia, KMHB disatukan di bawah supervisi seorang uskup yang berkedudukan di Singapura. *Superintendent* pertama yang ditunjuk untuk mensupervisi area KMHB adalah Harry Beeson Mansell. Pada tahun 1921, Uskup John W. Robinson memecah area ini ke dalam empat distrik: Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat. *Superintendent* yang ditunjuk untuk wilayah Jawa adalah Raymond L. Archer.²²

Pada tahun 1925, gereja Methodist di Surabaya ini telah berkembang pesat sekali. Dari 15 orang pengunjung ibadah pada tahun 1912 kini bertambah menjadi 300 orang anggota di dalam lima jemaat yang berbeda menurut bahasa yang dipergunakan. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan 400 pengunjung Sekolah Minggu, yang terbagi dalam 7 dialek Tionghoa yang berbeda. Dari kelima jemaat ini, satu jemaat sudah mandiri secara finansial sementara sisanya hanya mampu membiayai 50% sampai 75% pengeluarannya.

²² Coplestone, hal. 1164. Untuk Sumatera Selatan ditunjuk Mark Freeman, Sumatera Utara Leonard Oeschli, dan Kalimantan Barat Charles M. Worthington.

Perkembangan yang sedemikian pesat ini kemudian mendorong Bower dan anggota-anggota jemaat yang dilayaninya untuk mengusahakan sebuah gedung baru. Surat yang dikirimkan kepada Diffendorfer sebenarnya semacam proposal, yang diberi judul “The Surabaya Church Project,” untuk diteruskan kepada Badan Misi Luar Negeri Methodist di AS. Ia meminta supaya badan misi mau turut ambil bagian mendukung proyek senilai 65.000-75.000 USD ini. Gedung baru ini nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan gereja dan untuk melayani komunitas orang-orang Tionghoa yang hidup di Pecinan. Namun, dukungan yang diharapkan tidak kunjung didapatkan. Alih-alih mendapat dukungan pada tahun 1927, Bower mendapat kabar bahwa Badan Misi Luar Negeri Gereja Methodist Episkopal Amerika Serikat memutuskan menutup pekerjaan misi mereka di Jawa dan mengkonsolidasikan pekerjaan misi mereka di Sumatera Utara dan Selatan saja.²³ Pekerjaan yang sudah berlangsung selama lebih kurang dua dekade ini akhirnya harus berakhir dengan meninggalkan tanda-tanda masa depan yang baik.

Sebelum meninggalkan Surabaya pada tahun 1928 dan pindah tugas ke Palembang, Bower berhasil menolong gereja ini mendapatkan akta pendirian dengan nama *Tiong Hoa Kie Tok Kauw Hwee (THKTKH) Surabaya*.²⁴ Selain akta, Bower juga mengatur perubahan kepemilikan gedung gereja dari semula milik Gereja Methodist Episkopal Konferensi Misi Hindia Belanda kepada gereja THKTKH Surabaya.²⁵ Selanjutnya, untuk membantu pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ini Gereja Methodist menyerahkannya kepada badan misi Belanda yang berkarya di Jawa Timur.

²³ Lihat Ralph E. Diffendorfer dalam *Foreign Mission Report*, 55.

²⁴ Akta ini dibuat oleh notaris Jan Willem Bek, dengan akta nomor 41. Pada waktu pembuatan akta itu, hadir wakil-wakil dari tiga jemaat yang ada saat itu: Hokkien, Kanton dan Fuzhou-Kuoyu. Lihat Sugiarto Koentjoro, *Sinode Gereja Kristen Abdiel Dalam Lintasan Sejarah Dimulai dari Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee Surabaya 1909* (Surabaya: Sinode Gereja Kristen Abdiel, 2013), 17.

²⁵ *Ibid.* Sisa hutang pembangunan gereja yang masih ada sebesar 25.000 gulden dibayar oleh ketiga jemaat tersebut kepada para kreditor.

Persoalan-persoalan Sosial Orang-orang Tionghoa di Kota Surabaya

Orang-orang Tionghoa yang tinggal di kota Surabaya terdiri atas orang-orang Tionghoa peranakan dan orang-orang Tionghoa *totok*. Dari dua kelompok ini, yang disasar oleh misi Methodist adalah orang-orang Tionghoa *totok*. Dalam laporan-laporan yang disampaikan oleh *Superintendent* distrik kepada konferensi-konferensi tahunan gereja dan pertemuan-pertemuan lainnya, beberapa persoalan sosial yang mengemuka mengenai kondisi sosial orang-orang ini adalah sebagai berikut :

Masalah Kondisi Tempat Tinggal Yang Buruk

Dalam laporannya kepada Konferensi Tahunan Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia tahun 1915, Charles S. Buchanan, *superintendent* distrik Jawa, mengutip surat yang dikirim oleh Harry C. Bower di Surabaya kepadanya. Dalam surat itu Bower mengatakan bahwa di kota ini tinggal 15.000 orang Tionghoa asing dan 130.000 penduduk lokal.²⁶ Mereka tinggal di lokasi yang sudah ditetapkan untuk mereka oleh pemerintah kolonial, yang disebut *Chinesche Kamp*. Batas barat lokasinya adalah Kali Mas, sementara batas timurnya adalah Kali Pegirian, sementara di utara berbatasan dengan Kampung Melayu (*Maleische Kamp*). Mereka tinggal dalam lokasi yang luasnya kurang lebih 90.000 meter persegi.²⁷ Dengan jumlah penduduk sebesar 15.000 orang maka tingkat kepadatan manusia di Pecinan bisa mencapai 6 orang per meter persegi. Lokasi yang sangat padat dan tidak sehat untuk didiami.

Pecinan tentu tidak selalu sama luasnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah pendatang baru dari Tiongkok, luasnya terus bertambah. Namun jangan dipikirkan bahwa penambahan luasnya terjadi dengan mudah. Luas area itu terus bertambah namun jumlah populasinya lebih cepat pertambahannya. Menurut surat Bower pada tahun 1925, dari 230.000 jumlah penduduk kota Surabaya pada waktu itu, "40.000 are Chinese who have come

²⁶ *Minutes of the Twenty-Third Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, 14th-20th, 1915, 34.*

²⁷ Ini adalah perkiraan berdasarkan gambar dalam Peta Surabaya tahun 1866.

*there from China or are Java born Chinese.*²⁸ Karena tingkat kepadatan populasi yang begitu tinggi inilah maka bangunan-bangunan tempat tinggal mereka umumnya berbentuk ruko atau rumah toko.²⁹

Dalam laporannya kepada Konferensi Tahun Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia tahun 1911, John R. Denyes memberikan sedikit gambaran tentang kondisi tempat tinggal dan tempat kerja orang-orang Tionghoa di Pecinan kala itu. Ruang ibadah yang dipakai pertama kali pada tahun 1909 adalah sebuah rumah toko, yang dilukiskan sebagai *“a very dirty little shop house in a very narrow and very dirty blind alley.”*³⁰ Rumah tinggal sekaligus tempat usaha ini kondisinya sangat kotor dan berada di sebuah gang sempit, gelap dan kotor. Akibat ruang Pecinan yang sempit dan dengan populasi penduduk yang padat maka sukar sekali bagi Misi Methodist mendapatkan sebuah gedung yang lebih baik dari itu. Dalam laporannya kepada konferensi tahunan 1912, Denyes melukiskan secara singkat perihal kesukaran memperoleh ruang yang memadai untuk ibadah di Pecinan. Ia menulis, *“At this place the space allotted by the government to the Chinese for residence is painfully inadequate, and it is next to impossible to find an empty house.”* Tidak saja ruangan yang sempit, drainase juga menjadi persoalan serius. Pada musim penghujan, hujan yang kecil saja sudah dapat membuat jalan yang menuju gedung gereja tak bisa dilewati—*“impassable”*—karena banjir.³¹

Masalah Lingkungan Sosial Dan Moral Yang Buruk

Dalam proposal *“The Surabaya Church Project”*, Bower menyampaikan bahwa gedung baru yang mau didirikan diapit di ketiga sisinya oleh tiga buah hotel. Hotel-hotel ini adalah tempat penginapan para perantau Tionghoa yang datang datang ke Surabaya untuk mencari nafkah. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang muda. Namun hotel-hotel itu, dalam kacamata Bower bukanlah suatu *“desirable places”*, tempat yang baik.

²⁸ Harry C. Bower, *“Sorabaja Church Project”*, July 11, 1925, 3.

²⁹ Handinoto, *“Lingkungan ‘Pecinan’ Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial”* dalam *Dimensi Teknik Sipil Vol. 27, No. 1, Juli 1999*, 20.

³⁰ *Minutes of the Nineteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911*, 28.

³¹ *Ibid.*

Alasannya, karena di hotel-hotel itu *“the native woman are allowed free access.”* Perempuan-perempuan lokal yang ia maksud adalah para pekerja seks komersial. Selain sebagai tempat menginap, hotel-hotel itu sekaligus adalah lokasi transaksi seks komersial.

Selain seks komersial, dalam kompleks Pecinan Bower tidak menemukan tempat yang baik bagi anak-anak muda untuk menghabiskan malam mereka. Ia menulis bahwa di sana tidak ada satupun *“a clean social or an intellectual atmosphere.”* Di mana-mana mudah sekali ditemukan *“gambling dens and low grade movie shows and other places catering the immoral impulses of young man.”* Jadi, selain pelacuran persoalan sosial lain yang dihadapi adalah perjudian, film-film bermutu rendah dan tempat-tempat yang menawarkan hiburan yang tidak sehat.

Masalah Hidup Sendiri Tanpa Keluarga Dan Pasangan

Dalam proposal itu, Bower juga menulis bahwa banyak di antara orang-orang Tionghoa yang merantau di Surabaya ini adalah anak-anak muda. Mereka meninggalkan rumah dan keluarganya di Tiongkok untuk berbisnis di Surabaya.³² Dalam laporannya kepada konferensi para isteri misionaris Methodist di Hindia Belanda tahun 1915, Mabel Crawford Bower, isteri Harry C. Bower, melaporkan pula bahwa sebagian besar laki-laki di gerejanya adalah *“unmarried or have left their families in China and become foreigners that they may become rich.”*³³ Karena jauh dari keluarga dan pasangan maka mereka menjadi sangat rentan untuk jatuh ke dalam godaan pelacuran, perjudian dan kehidupan yang tidak baik.

Masalah Pendidikan

Sampai akhir abad ke-19, sekolah-sekolah tradisional Tionghoa tumbuh pesat di Hindia Belanda. Leo Suryadinata melaporkan bahwa pada tahun 1899 ada sekitar 217 sekolah semacam itu di Jawa dan Madura dengan 4.452 siswa. Di pulau-pulau lain di luar

³² Lihat juga laporan Charles S. Buchanan, *District Superintendent*, dalam *Minutes of Twenty-second Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, January 10th to 16th, 1914*, 37.

³³ Lihat *Minutes of the Woman's Conference of Malaysia Mission, Singapore, February 14th to 20th, 1915*, 111.

Jawa ditemukan 152 sekolah dengan 2.170 siswa.³⁴ Sekolah-sekolah ini disebut tradisional untuk membedakannya dari sekolah modern Tionghoa yang nanti akan didirikan oleh kelompok *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK) pada tahun 1900. Sekolah-sekolah tradisional ini juga dikenal dengan nama *Sekolah Hokkien* karena medium pengajarannya adalah bahasa Hokkien. Kurikulumnya berisi penguasaan kitab-kitab klasik Konfusianisme dengan tekanan belajar pada menghafal teks dari pada memahami teks.³⁵ Dengan tekanan semacam ini maka lulusan-lulusan sekolah ini tidak diperlengkapi secara memadai untuk melakukan suatu pekerjaan. Kalaupun mereka kemudian diterima bekerja di suatu tempat maka penghasilan yang diterima begitu rendah sekali.

Sekolah-sekolah ini hidup dari kontribusi orang tua siswa karena pemerintah Belanda tidak memberikan subsidi khusus untuk membiayai operasional sekolah-sekolah orang Tionghoa. Akibatnya, hanya keluarga-keluarga tertentu yang cukup kaya saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah ini. Mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu hampir tidak mungkin untuk bersekolah. Di pihak lain, persoalan medium pengajaran yang memakai bahasa Hokkien makin mengurangi minat orang tua dari dialek yang berbeda untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut.³⁶

Pada tahun 1901 di Batavia untuk pertama kalinya berdiri sebuah sekolah Tionghoa modern. Sekolah ini didirikan oleh sebuah perkumpulan orang Tionghoa yang bernama *Tiong Hoa Hwe Koan* (THHK). Sekolah ini asalnya dari sekolah Hokkien juga, sekolah *Lu Kui-fang*, namun memakai sistem baru yang sudah dipakai di Jepang.³⁷ Berbeda dari sekolah-sekolah Tionghoa tradisional, di sekolah-sekolah baru ini, kitab-kitab klasik Konfusianisme tidak lagi diajarkan. Materi pengajaran diimpor dari

³⁴ Leo Suryadinata, "Indonesian Chinese Education: Past and Present" dalam *Indonesia Vol. 14* (Oct. 1972), 51.

³⁵ Ibid. Lihat juga Lea E. Williams, "Nationalistic Indoctrination in the Chinese Minority Schools of Indonesia" dalam *Comparative Education Review*, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958), 13.

³⁶ Lea E. Williams dalam *Comparative Education Review*, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958), 13.

³⁷ Ibid., 14; Suryadinata dalam *Indonesia Vol. 14* (Oct. 1972), 53.

Jepang. Bahasa pengantar studi bukan lagi Hokkien melainkan *Kuoyu*.³⁸

Ketika tiba di Surabaya pada tahun 1912, Rev. Bower dan isterinya sudah menemukan hadirnya sekolah Tionghoa modern ini. Sekolah ini berdiri pada tahun 1907 dan terletak di daerah Kapasan dan Keputran.³⁹ Bower sendiri mengajar di sekolah itu dan menjadi *Head of English Department* di sekolah tersebut selama lima tahun.⁴⁰

Meski sudah ada sekolah seperti ini di Surabaya namun tidak semua anak yang tinggal di Pecinan dapat masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Kehidupan mereka yang terpisah-pisah oleh sentimen etnis dan dialek bahasa serta belum populernya bahasa *Kuoyu* atau bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional tampaknya yang menjadi alasan mengapa sekolah ini belum diminati oleh sebagian pendatang dari Tiongkok. Apalagi sejak munculnya sekolah Belanda untuk orang-orang Tionghoa (*Hollandsch Chineesche School*) pada tahun 1907, pamor sekolah ini di sebagian kalangan orang Tionghoa jadi berkurang. Orang-orang Tionghoa peranakan lebih senang mensekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda dari pada ke sekolah THHK.⁴¹

Dalam *Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth* yang ditulis oleh Pdt. Fredie Lukito Setiawan, ada catatan yang menyatakan bahwa “mayoritas orang Kanton tidak bisa membaca dan menulis bahasa Kanton.”⁴² Diceritakan juga bahwa hal itu

³⁸ Leo Suryadinata, “Indonesian Chinese Education: Past and Present” dalam *Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972)*, 53.

³⁹ Pada mulanya bernama Ho Tjiong Hak Kwan, yang didirikan pada 5 November 1903 oleh Liem Sioe Tien, Phoa Lian Tjing, Kwee Lian Phik dan Go Khing Lian. Berbeda dari sekolah THHK di Batavia yang langsung memakai bahasa *Kuoyu*, sekolah di Surabaya ini mulai dengan bahasa Hokkien sebagai bahasa pengantarnya. Bahasa *Kuoyu* baru mulai dipergunakan sebagai medium instruksi pada tahun 1909. Lihat Bagus Johansyah, “Tiong Hwa Hwe Koan (T.H.H.K) Surabaya 1903-1942” dalam *AVATARA, Vol. 1, No. 1, Januari 2013*, 119.

⁴⁰ Bahasa Inggris merupakan salah satu yang sangat ditekankan untuk dikuasai di sekolah-sekolah THHK. Lihat Suryadinata dalam *Indonesia Vol. 14 (Oct. 1972)*, 54.

⁴¹ Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 314.

⁴² Halaman 7.

membuat mereka rentan terhadap perbuatan orang-orang yang ingin mendapatkan suatu keuntungan politis dari mereka.

Dalam laporannya kepada konferensi tahunan misi Gereja Methodist di Hindia Belanda tahun 1922, Harry Beeson Mansell, *District Superintendent*, melaporkan bahwa pada bulan Januari 1921, orang-orang Tionghoa Kristen dari dialek Kanton telah mendirikan sebuah perkumpulan orang-orang Kristen Kanton. Kelompok ini kemudian diintegrasikan ke dalam jemaat orang-orang yang berbahasa Kanton.⁴³ Yang menarik dari perkumpulan ini adalah bahwa mereka dilaporkan telah berhasil membeli sebidang tanah seharga f15.000,- Di atas tanah ini “*they hope to erect a School building.*”⁴⁴

Respons Gereja Methodist kepada Problema Sosial Orang Tionghoa di Kota Surabaya

Sebelum masuk ke Hindia Belanda, Gereja Methodist sudah terlibat secara aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang dihadapi oleh masyarakat di mana mereka berada di negara federasi Malaysia, yang waktu itu mencakup Malaysia dan Singapura. Dalam setiap konferensi tahunannya, Gereja Methodist Konferensi Malaysia selalu menyediakan waktu dan ruang untuk membicarakan apa yang mereka disebut “*public morals.*” Tugas untuk mengkaji dan mencarikan solusi atas masalah-masalah moral publik diserahkan kepada sebuah komisi khusus yang diberi nama *Committee of Public Morals*, atau Komisi Moral Publik. Masalah-masalah moral umum yang banyak mewarnai percakapan dalam konferensi-konferensi mereka adalah soal perjudian, minuman keras dan perdagangan perempuan serta prostitusi.

Dalam konferensi tahunan tahun 1905, komisi tetap yang mengurus hal-hal ini melaporkan kepada persidangan hal-hal yang sudah dilakukan untuk menghentikan penyakit sosial perjudian yang marak di Negara Federasi Malaysia. Laporan yang disiapkan

⁴³ Menurut catatan dalam buku Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth, perkumpulan ini diberi nama “Tjhing Nian Tjik Kim Hwee.” Lihat Fredi Lukito Setiawan, *Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazaret*, 28.

⁴⁴ *Minutes of the Fourth Session of the Netherland Indies Mission Conference of the Methodist Episcopal Church*, Buitenzorg, Java, February 8th to 13th, 1922, 113.

oleh W.E. Horley, H.L.E. Luring dan William T. Cherry itu mengatakan bahwa mereka telah menyusun sebuah draft "Memorial" yang berisi petisi kepada pemerintah agar melarang "Gambling Farms", tempat-tempat perjudian di seluruh negara. Surat itu akan dikirim kepada seorang pejabat tinggi pemerintah untuk selanjutnya diteruskan kepada "the Secretary of State of the Colonies", semacam menteri urusan negara-negara jajahan Inggris.⁴⁵

Dalam draft yang sama juga dimasukkan petisi lain, yang berhubungan dengan makin banyaknya izin yang dikeluarkan untuk membuka kedai-kedai minuman keras. Jumlah kedai-kedai itu dirasa sudah melampaui batas dari yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, minum-minum dan mabuk-mabukan menjadi kenyataan sehari-hari yang mudah ditemukan. Hal lain yang juga disentuh oleh petisi ini adalah soal perdagangan opium. Secara institusional, Gereja Methodist Konferensi Malaysia menyampaikan petisi kepada pemerintah supaya melarang perdagangan minuman keras, mengendalikannya dengan memberikan pajak yang sangat tinggi dan mengurangi jumlah tempat-tempat yang menjualnya.⁴⁶

Perjuangan yang sungguh-sungguh atas hal ini melahirkan buahnya. Dalam konferensi tahunan tahun 1910 dilaporkan oleh Komisi Moral Publik bahwa perdagangan opium sudah berada di bawah regulasi pemerintah. Selain itu, usaha mereka supaya pemerintah melarang menghisap candu di pangkalan-pangkalan becak (*rickshaw*) dan rumah-rumah bordil juga telah mendapat respons yang baik dari pemerintah. Kini menghisap candu di tempat-tempat itu dilarang.⁴⁷ Dalam konferensi tahunan di tahun-tahun selanjutnya, terus dilaporkan persoalan-persoalan sosial dalam masyarakat negara federasi Malaysia dan bagaimana perjuangan serta keberhasilan mereka di situ. Salah satu prestasi besar yang berhasil dicapai adalah dihapuskannya izin-izin perjudian di seluruh negara federasi Malaysia. Penghapusan perjudian dan penutupan semua tempat perjudian disyukuri habis-

⁴⁵ *Minutes of the Thirteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Kuala Lumpur, February 15th-20th, 1905, 44.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Minutes of the Eighteenth Sesion of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 5th-10th January, 1910, 37-38.

habisan sebagai karya Allah yang hebat mengingat efek kerugian yang begitu besar pada penerimaan negara.⁴⁸

Dalam kaitan dengan persoalan sosial di Hindia Belanda, persoalan yang pertama mendapat perhatian mereka adalah perdagangan candu. Dalam konferensi tahunan tahun 1913, Komisi Moral Publik menyerukan kepada pemerintah Malaysia dan Hindia Belanda supaya mengambil langkah-langkah pembatasan "*so that the entire traffic can be brought to a speedy end.*"⁴⁹

Selain perdagangan candu, persoalan lain yang mendapat perhatian mereka adalah perdagangan perempuan dan prostitusi. Sudah sejak konferensi tahun 1913 dilaporkan secara panjang lebar bahwa sedang berlangsung apa yang mereka sebut "*the slave trade in women.*" Perempuan-perempuan ini berasal dari Tiongkok dan Jepang. Mereka dibawa dari sana dan diperdagangkan sebagai budak seks di kawasan ini. Dalam konferensi ini, Gereja Methodist menyerukan kepada seluruh gereja dan masyarakat di kawasan ini supaya sadar akan masalah ini. Mereka menyusun sebuah petisi yang akan dibawa kepada konsul pemerintah Tiongkok dan Jepang, yang isinya mendesak pemerintah kedua negara supaya segera mengambil tindakan.⁵⁰

Dalam konferensi tahun 1914 Gereja Methodist secara khusus berseru kepada gereja-gereja di Malaysia dan Hindia Belanda supaya bersatu padu dalam mengatasi persoalan ini.

*We again call upon the churches of Malaya and the Netherland Indies to take united action upon this matter. Until the churches speak out this traffic will go on unhindered. We must speak out in Christ's Name. Let a public meeting of all the churches be held in Singapore at an early date.*⁵¹

⁴⁸ Total kerugian negara waktu itu adalah \$ 2000.000,-. Lihat *Minutes of the Twenty-first Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 13th to 19th, February, 1913, 47.

⁴⁹ *Minutes of the Twenty-first Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 13th to 19th, February, 1913, 48.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ *Minutes of the Twenty-two Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 10th to 16th January, 1914, 61.

Yang cukup menarik dalam seruan ini adalah ajakan untuk melakukan sebuah rapat umum (*public meeting*) secepatnya. Sebuah rapat umum adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di tempat umum, di suatu ruang terbuka, yang bisa disaksikan dan didengarkan oleh masyarakat umum. Pertemuan semacam ini dimaksudkan untuk membuka kesadaran publik yang selama tertidur atas sebuah masalah sosial.

Dalam satu dua konferensi kota Bangka, kota Medan dan Jawa disebut-sebut. Namun kota Surabaya dan keadaan masyarakat Tionghoa di kota itu tidak pernah disebut. Dari laporan aktivitasnya, Komisi Moral Publik tampaknya fokus pada mengurus persoalan-persoalan yang solusinya berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti izin perjudian, prostitusi, perdagangan perempuan, izin produksi dan penjualan minuman keras dan perdagangan candu. Soal lain yang cukup banyak mendapat perhatian mereka adalah masalah *social temperance* atau kemampuan anggota masyarakat untuk menahan dirinya. Prostitusi dan kehidupan yang tidak bermoral, bersama-sama dengan menghabiskan hari Minggu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak rohani seperti ibadah, banyak dihubungkan dengan isu ini.

Mungkin yang bisa disebut sebagai respons Gereja Methodist terhadap persoalan sosial orang-orang Tionghoa di kota Surabaya adalah kerja samanya dengan organisasi Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) di bidang pendidikan. Pada tahun 1910, mewakili Gereja Methodist, J.R. Denyes, *District Superintendent*-nya, sepakat menjalin suatu kerja sama dengan sekolah-sekolah THHK. Dalam kerja sama ini, Gereja Methodist akan mensuplai kebutuhan guru-guru bahasa Inggris untuk sekolah-sekolah THHK, sementara THHK akan memberikan gaji yang "*equivalent to regular missionary salaries*."⁵² Meski di sekolah-sekolah ini misionaris Methodist dilarang membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan agama, mereka tetap mau bekerja sama juga.⁵³ Alasannya ada dua. Pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup para

⁵² Copplestone, 151.

⁵³ Lihat laporan Mabel Crawford Bower pada konferensi perempuan Methodist Malaysia dalam *Minutes of the Woman's Conference of Malaysia Mission*, Singapore, 14th to 20th February, 1915, 111.

misionaris; dan kedua untuk *“the care of practically all the future leaders among the Chinese of Java.”*⁵⁴

Dalam kerangka kerja sama itulah Bower dan isterinya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di sekolah THHK di Surabaya. Oleh sekolah Bower diposisikan tidak saja sebagai guru namun juga sebagai *Head of English Department*. Setiap hari, dari tahun 1912-1917, ia dan isterinya diserahi tugas mengajar kurang lebih 200-an siswa.⁵⁵ Setelah jam mengajar usai di sore hari, pada malam harinya mereka berdua memberikan les-les privat bahasa Inggris kepada sejumlah besar siswa.⁵⁶

Hal lain yang dapat dikatakan di sini adalah usaha gereja membangun sebuah pusat kegiatan masyarakat Tionghoa dan kamar-kamar penginapan untuk orang-orang Tionghoa. Usaha ini diwujudkan dalam proposal membangun sebuah gedung gereja baru dengan konsep yang holistik. Maka lahirlah sebuah desain gedung tiga lantai dengan konsep sebagai berikut :

The first two floors to be devoted to religious work. There are many young men who desires to study English and to pursue a business course who would be willing to pay for these lessons. We need a social hall where we can have games of all kinds, also moving pictures... The third floor of the building is to be made dormitories for the young men who otherwise would have to live in the Chinese hotels.

Dalam paragraf terakhir surat yang berupa proposal itu, Bower sekali lagi menjelaskan konsep gedung tiga lantai itu. Dua lantai pertama akan dipergunakan untuk ruang ibadah Minggu, kelas-kelas Sekolah Minggu, ruang baca dan ruang bermain, ruang-ruang untuk Kelas Bahasa Inggris dan kursus bisnis, serta untuk sebuah klinik kesehatan. Di lantai ketiga akan dibuat kamar-kamar penginapan, yang disewakan dan biaya sewanya akan dipakai menutupi pengeluaran gereja.

⁵⁴ Copplestone, 151.

⁵⁵ Lihat laporan Mabel Crawford Bower pada konferensi perempuan Methodist Malaysia dalam *Minutes of the Woman's Conference of Malaysia Mission*, Singapore, 14th to 20th February, 1915, 111.

⁵⁶ *Minutes of the Twenty-third Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 14th to 20th February, 1915, 34.

Sayang sekali konsep visioner ini kurang mendapat perhatian dan dukungan finansial baik dari jemaat-jemaat Gereja Methodist Episkopal di Amerika Serikat maupun dari tempat-tempat lain yang diharapkan. Sampai hari Bower meninggalkan Surabaya, cita-citanya tidak bisa diwujudkan.⁵⁷

Untuk mengatasi problem yang ditimbulkan oleh film-film berkualitas buruk terhadap kehidupan moral publik, Gereja Methodist memberikan alternatif tandingan, dengan memutar film-film yang berkualitas baik di gereja. Dalam proposal gedung gereja baru, Bower melaporkan bahwa sepanjang tahun 1924, ia telah mengadakan pemutaran film di gereja tiap Selasa malam. Ia sangat bergembira karena acara itu diminati oleh 300 sampai 400 orang tiap kali pemutaran.⁵⁸ Suatu jumlah yang amat besar.

Hal lain yang patut dicatat di sini adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen dari jemaat berdialek Kanton. Menyadari bahwa banyak dari anggota gereja dan anak-anaknya adalah para penyandang buta aksara dan tidak mampu maka pada tahun 1923, mereka mendirikan sebuah sekolah dengan dialek Kanton sebagai medium instruksional. Sekolah ini diberi nama *Chen Kwang* dan diasuh oleh seorang guru bernama Kam Yen Kim. Sayang sekali, terobosan besar ini hanya seumur jagung usianya. Karena sakit-sakitan, Kam Yen Kim akhirnya terpaksa pulang kembali ke Tiongkok. Ketiadaan guru membuat sekolah akhirnya ditutup pada tahun 1925.⁵⁹ Awal tahun 30-an awal, sekolah kembali dibuka. Kali ini siswa yang diterima tidak saja dari kalangan orang berdialek Kanton. Siswa dari dialek lain turut pula diterima. Setelah bertahan cukup lama, sekolah ini akhirnya harus ditutup juga sewaktu Jepang datang menduduki tanah Hindia Belanda.⁶⁰

KESIMPULAN

Kehadiran Gereja Methodist di kota Surabaya pada awal abad ke XX memang tidak lama. Kurang dari 20 tahun saja. Dalam

⁵⁷ Penempatan terakhir Bower dan isteri adalah di Palembang, Sumatera Selatan. Pada tahun 1935, mereka mengundurkan diri dari ladang misi dan kembali ke AS. https://www.lycoming.edu/umarch/me_pastors/b.htm (Diakses pada 2/10/2012).

⁵⁸ Bower, *The Surabaya Church Project*, 4.

⁵⁹ Fredi Lukito Setiawan, *Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth*, 7-8.

⁶⁰ Fredie Lukito Setiawan, 29-33.

masa sependek itu dan dengan segala keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, tentu tidak adil mengharapkan mereka melakukan sesuatu yang besar. Ditambah lagi sifat kehadiran mereka di Hindia Belanda berbeda dari di negara federasi Malaysia. Kalau di Malaysia mereka “*under the protection of the great British Empire*”⁶¹ – negara dan penguasa politis dari sebagian misionaris Methodist, di Hindia Belanda mereka berada dalam negara dan di bawah kekuasaan bangsa asing (baca: Belanda). Dengan posisi ini maka jauh lebih mudah bagi mereka untuk menyebarkan “*our utmost influence in creating a wholesome public sentiment*.”⁶² Lalu, jika di Malaysia sebagian pekerja gerejanya adalah warganegara Inggris maka di Hindia Belanda, mereka semua adalah orang-orang asing, yang harus tunduk pada ketentuan sipil yang berbeda.

Walau demikian, secara institusional, dalam organisasi Gereja Methodist Episkopal Konferensi Malaysia—semacam sinode kalau mau dikatakan begitu—mereka telah ambil bagian dalam mendorong pemerintah di Hindia Belanda mengambil kebijakan-kebijakan kongkrit menghentikan perjudian, produksi dan konsumsi minuman keras yang berlebihan, penjualan candu, perdagangan perempuan dan prostitusi. Kalau secara institusional salah satu tugas gereja utama gereja menurut Van Reken adalah menjaga kemurnian ajaran maka segala petisi yang disampaikan kepada pemerintah dilakukan karena hal-hal yang dipetisi dipandang sudah tidak sejalan dengan doktrin dan pedoman iman Methodisme pada masa itu.⁶³

⁶¹ Laporan Komisi Moral Publik dalam konferensi tahunan di tahun 1909 dalam *Minutes of the Seventeenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church*, Singapore, Straits Settlements, 5th to 9th February 1909, 44.

⁶² Ibid.

⁶³ Dalam sebuah buku pedoman iman Gereja Methodist Episkopal yang terbit tahun 1912 disebutkan sejumlah hiburan yang dilarang untuk dinikmati karena dianggap sebagai “serious barriers to the beginning of the religious life and fruitful causes to spiritual decline” dan “antagonistic to vital piety, promotive of worldliness, and especially pernicious to youth.” Hiburan-hiburan itu antara lain adalah mengunjungi teater, berdansa-dansi, dan perjudian. Lihat *Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church* (New York/Cincinnati: The Methodist Book Concern, 1912), hal. 56-57. Dalam buku doktrin yang lebih tua dari tahun 1824 disebutkan bahwa menjual minuman beralkohol dilarang. Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak bermoral. Lihat *The Doctrine and the Discipline of the Methodist Episcopal Church* (New York: N. Bangs and J. Emory, 1824), 92.

Selanjutnya, dalam konteks kehidupan di Pecinan Surabaya, Gereja Methodist telah menyadari sejumlah masalah sosial yang ada di sana. Masalah-masalah seperti prostitusi dan perjudian coba diupayakan secara organistik dengan sebuah konsep gedung gereja baru. Bahwa hal ini tidak terwujud sampai kepergian mereka dari Surabaya tentu patut disayangkan. Namun disain itu telah memperlihatkan bahwa penyelesaian di level institusional perlu dilengkapi pula dengan di level organistik, yang berisi aksi nyata individu-individu anggota gereja melalui penyediaan sarana pelayanan publik di dalam kompleks bangunan gereja.

Partisipasi di level organistik juga terlihat pada upaya kelompok orang-orang Kristen dialek Kanton menyelesaikan masalah pendidikan anak-anak orang Kanton. Mereka membangun sebuah perserikatan, mengumpulkan uang, membeli tanah untuk dibangun sekolah dan memulai sebuah sekolah komunitas orang-orang berdialek Kanton. Yang patut dicatat dari kelompok ini adalah bahwa awalnya mereka adalah kelompok yang terpisah dari gereja. Meski anggota-anggotanya harus "Chinese Christians over eighteen years of age"⁶⁴ namun di awal organisasi ini sama sekali bukan *onderbouw* Gereja Methodist. Mereka lahir dari semangat untuk menolong menyelesaikan salah satu masalah pelik orang Tionghoa waktu itu.

Dari semua ini menjadi jelas bahwa baik secara institusional maupun secara organistik, Gereja Methodist Episkopal jemaat Pecinan Surabaya telah berupaya berbuat sesuatu untuk mengatasi problema sosial yang dihadapi masyarakat Tionghoa di Pecinan Surabaya. Upaya-upaya ini memang lebih banyak bersifat lokal dalam Pecinan dan belum sampai keluar menyentuh masyarakat luas di kota Surabaya. Dalam konteks lokal itu, pendekatan yang dipakai adalah menciptakan sebuah ruang alternatif di tengah-tengah atmosfer sosial Pecinan yang dipandang merosot secara moral. Pendekatan semacam ini untuk sejenak memang mampu menghindarkan orang-orang yang mau ditolong "selamat" dari menghirup udara kotor moral public. Namun untuk jangka menengah dan jangka panjang pendekatan semacam ini tidak akan memberi dampak apa-apa. Dibutuhkan pendekatan lain

⁶⁴ *Minutes of the Fourth Session of the Netherlands Indies Mission Conference of the Methodist Episcopal Church, Buitenzorg, Java, February 8th to 13th, 1922, 113.*

yang harus menyentuh kebijakan dan politik anggaran pemerintah agar masalah-masalah sosial itu dapat benar-benar direduksi seminimal mungkin. Hal terakhir ini adalah pekerjaan rumah bagi gereja-gereja Tionghoa yang lahir dari gereja ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Benware, Paul. *"The Social Responsibility of the Church"* dalam *Grace Journal* 12:1 (Winter 1971).

Bower, Harry C. *"Sorabaja Church Project"*, July 11, 1925.

Copplestone, J. Tremayne. *History of Methodist Mission Vol. IV: Twentieth-Century Perspectives (The Methodist Episcopal Church, 1896-1939)*. New York: The Board of Global Ministries The United Methodist Church, 1973.

Diffendorfer, Ralph E. *Foreign Mission Report dari Report of Corresponding Secretary tahun 1927*.

Doctrines and Discipline of the Methodist Episcopal Church (New York/Cincinnati: The Methodist Book Concern, 1912).

The Doctrine and the Discipline of the Methodist Episcopal Church (New York: N. Bangs and J. Emory, 1824).

Handinoto, "Lingkungan 'Pecinan' Dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial" dalam *Dimensi Teknik Sipil* Vol. 27, No. 1, Juli 1999.

Hauerwas, Stanley. "Repent! The Kingdom is Here" dalam *Christianity and Social Crisis in the 21st Century*.

Johansyah, Bagus. "Tiong Hwa Hwe Koan (T.H.H.K) Surabaya 1903-1942" dalam *AVATARA*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

Koentjoro, Sugiarto. *Sinode Gereja Kristen Abdiel Dalam Lintasan Sejarah Dimulai dari Tiong Hwa Kie Tok Kauw Hwee Surabaya 1909*. Surabaya: Sinode Gereja Kristen Abdiel, 2013.

Minutes of the Thirteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Kuala Lumpur, February 15th-20th, 1905.

Minutes of the Seventeenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 5th to 9th February 1909.

Minutes of the Nineteenth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, 11th to 18th February, 1911.

Minutes of the Twentieth Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, 15th to 20th February, 1912.

Minutes of the Twenty-second Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, January 10th to 16th, 1914.

Minutes of the Twenty-third Session of the Malaysia Conference of the Methodist Episcopal Church, Singapore, Straits Settlements, 14th to 20th February, 1915

Minutes of the Woman's Conference of Malaysia Mission, Singapore, 14th to 20th February, 1915.

Minutes of the Fourth Session of the Netherlands Indies Mission Conference of the Methodist Episcopal Church, Buitenzorg, Java, February 8th to 13th, 1922.

Raines, John C., ed., *Marx On Religion* (Philadelphia: Temple University Press, 2002).

Rauschenbusch, Walter. *Christianity and Social Crisis in the 21st Century: The Classic that Woke up the Church*, Paul Raushenbush, ed. Harper-Collins e-books.

Setiawan, Fredi Lukito. *Sejarah Gereja Kristus Tuhan Jemaat Nazareth*. Tanpa tahun dan tempat.

Setiono, Benny G. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008).

Suryadinata, Leo. "Indonesian Chinese Education: Past and Present" dalam *Indonesia Vol. 14* (Oct. 1972).

Van Reken, Calvin. "The Church's Role in Social Justice" dalam *Calvin Theological Journal* 34 (1999): 198-202.

Williams, Lea E. "Nationalistic Indoctrination in the Chinese Minority Schools of Indonesia" dalam *Comparative Education Review*, Vol. 1, No. 3 (Feb., 1958).